

# Implementation of Social Assistance in Efforts to Reduce Poverty in Banjarbendo Village

## [Implementasi Bantuan Sosial (BANSOS) Dalam Upaya Pengurangan Kemiskinan Di Desa Banjarbendo]

Nafilah Dzakiyah Al Azizah<sup>1)</sup>, Isna Fitria Agustina<sup>\*2)</sup>

<sup>1)</sup>Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

<sup>2)</sup> Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

\*Email Penulis Korespondensi: [isnaagustina@umsida.ac.id](mailto:isnaagustina@umsida.ac.id)

**Abstract.** Poverty remains a major issue in developing countries, including Indonesia, which affects the level of community welfare, especially in rural areas. Banjarbendo Village is one of the villages that still faces challenges in poverty reduction efforts. The government has implemented various social assistance (Bansos) programs as a form of social protection to help low-income communities meet their basic needs. This study aims to analyze the implementation of social assistance in poverty reduction efforts in Banjarbendo Village using George C. Edward III's policy implementation theory, which includes communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. This research employed a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving village officials and social assistance beneficiaries. The results show that in the communication aspect, the village government has conveyed information about social assistance programs to the community in a fairly clear and transparent manner, although some residents still do not fully understand the program details. In terms of resources, the implementation of social assistance is supported by village officials and existing mechanisms; however, there are limitations in the number of personnel and dependence on central government policies in determining beneficiaries. Regarding disposition, village officials demonstrate commitment and supportive attitudes toward the implementation of social assistance, enabling the program to be carried out responsibly. Meanwhile, in the bureaucratic structure aspect, the implementation of social assistance already has clear procedures, division of tasks, and coordination among stakeholders, allowing the distribution of assistance to run relatively orderly. Overall, the implementation of social assistance in Banjarbendo Village has been carried out quite well and contributes to fulfilling the basic needs of the community and supporting poverty reduction efforts, although improvements are still needed in information dissemination and strengthening implementer resources.

**Keywords** – implementation; Social assistance; poverty

**Abstrak.** Kemiskinan masih menjadi permasalahan utama di negara berkembang, termasuk Indonesia, yang berdampak pada rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan. Desa Banjarbendo merupakan salah satu desa yang masih menghadapi tantangan dalam upaya pengurangan kemiskinan. Pemerintah telah melaksanakan berbagai program bantuan sosial (Bansos) sebagai bentuk perlindungan sosial untuk membantu masyarakat miskin memenuhi kebutuhan dasar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi bantuan sosial dalam upaya pengurangan kemiskinan di Desa Banjarbendo dengan menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan melibatkan perangkat desa dan masyarakat penerima bantuan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada aspek komunikasi, pemerintah desa telah menyampaikan informasi program bansos kepada masyarakat secara cukup jelas dan terbuka, meskipun masih terdapat sebagian warga yang belum sepenuhnya memahami detail program. Pada aspek sumber daya, pelaksanaan bansos didukung oleh aparatur desa dan mekanisme yang tersedia, namun masih terdapat keterbatasan jumlah petugas serta ketergantungan pada kebijakan pusat dalam penentuan penerima bantuan. Dari aspek disposisi, aparatur desa menunjukkan komitmen dan sikap yang mendukung terhadap pelaksanaan bansos, sehingga program dapat dijalankan dengan tanggung jawab. Sementara itu, pada aspek struktur birokrasi, pelaksanaan bansos telah memiliki prosedur dan pembagian tugas yang jelas serta koordinasi antar pihak, sehingga penyaluran bantuan dapat berjalan relatif tertib. Secara keseluruhan, implementasi bantuan sosial di Desa Banjarbendo telah berjalan cukup baik dan berkontribusi dalam membantu pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat serta mendukung upaya pengurangan kemiskinan, meskipun masih diperlukan perbaikan pada aspek pemahaman informasi dan penguatan sumber daya pelaksana.

**Kata Kunci** - implementasi; bantuan sosial; kemiskinan

## I. PENDAHULUAN

Kemiskinan adalah satu urgensi di negara berkembang, termasuk Indonesia. Oleh karena itu banyak hal yang bisa di laksanakan oleh pemerintah untuk mengurangi kemiskinan salah satunya dengan di adakan nya Bansos upaya mengurangi kemiskinan. Kemiskinan di Indonesia adalah masalah sosial yang kompleks dan berakar pada berbagai faktor ekonomi, sosial, dan politik. Meskipun telah terjadi banyak kemajuan dalam pengentasan kemiskinan selama beberapa dekade terakhir, masalah ini tetap menjadi tantangan besar bagi negara. Diadakannya Bantuan sosial (bansos) adalah salah satu instrumen utama untuk menyediakan perlindungan masyarakat miskin dan rentan, serta membantu mereka terkait kebutuhan dasar sehari-hari [1]. Masalah kemiskinan seperti pembebasan dari rasa lapar, juga dikenal sebagai pembebasan dari keinginan, merupakan salah satu masalah terkait HAM. Hal ini didasarkan Konvensi Internasional untuk memenuhi konvenan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya (1966), seperti yang tercantum dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera dan mendapatkan lingkungan sehat serta layanan kesehatan. Sehingga, melawannya sama pentingnya dengan melindungi hak asasi manusia lainnya. Pembaruan pendidikan tinggi hukum merupakan bagian dari kepedulian intelektual hukum terhadap pengentasan kemiskinan, yang bertujuan untuk menghasilkan lulusan fakultas hukum yang idealis, dermawan, dan populis yang selalu berkhidmat kepada masyarakat daripada profesional hukum yang elitis[2] Berikut adalah penjelasan mengenai peran bantuan sosial dalam konteks kemiskinan di Indonesia, diawali pemerintah dengan Permensos no 1 tahun 2019 terkait cara pengeluaran bantuan sosial lingkungan didistribusikan oleh Kementerian Sosial [3]. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Pergub No 35 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial [4]. Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo No. 54 Tahun 2019 perubahan keempat atas peraturan Bupati Sidoarjo nomor 38 tahun 2015 tentang pedoman pengelolaan bansos, Kabupaten Sidoarjo sehingga semua pihak harus bekerja sama [5]. Peraturan Kades Banjarnendo Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung (BLT) Dana Desa Tahun Anggaran 2024.

Program bantuan sosial yang diterima masyarakat Desa Banjarnendo terdiri dari beberapa jenis bantuan yang bersumber dari pemerintah pusat maupun daerah. Bantuan tersebut menasar masyarakat kurang mampu yang telah terdata sebagai keluarga penerima manfaat sesuai dengan kriteria yang ditetapkan pemerintah. Setiap jenis bantuan memiliki karakteristik penerima serta mekanisme penyaluran yang berbeda. Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan bantuan sosial bersumber dari pemerintah pusat yang diberikan kepada keluarga miskin dengan kategori tertentu seperti ibu hamil, anak sekolah, lansia, dan penyandang disabilitas. Bantuan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan keluarga penerima manfaat. Selain PKH, terdapat Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang bersumber dari APBN maupun APBD. BPNT diberikan kepada keluarga kurang mampu dalam bentuk bantuan pangan guna memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Selanjutnya, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) merupakan bantuan yang bersumber dari dana desa dan diperuntukkan bagi warga miskin atau rentan miskin yang terdampak kondisi ekonomi tertentu, seperti bencana atau krisis ekonomi. Bantuan ini diberikan dalam bentuk uang tunai yang disalurkan secara berkala. Perubahan jumlah penerima dari tahun ke tahun menunjukkan adanya penyesuaian data penerima, kebijakan pemerintah, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat Desa Banjarnendo. Secara umum, bantuan sosial yang diterima masyarakat mencerminkan upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan sosial melalui bantuan tunai maupun non tunai. Data jumlah penerima masing-masing jenis bantuan sosial dari tahun 2021 hingga 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1. Data penerima bantuan sosial 2021-2024

| TAHUN | PKH | APBD (BPNT) | APBN (BPNT) | BLT-DD |
|-------|-----|-------------|-------------|--------|
| 2021  | 115 | 11          | 156         | 150    |
| 2022  | 110 | 6           | 183         | 110    |
| 2023  | 110 | 6           | 332         | 60     |
| 2024  | 110 | -           | 7           | 25     |

Sumber: di olah dari pemerintah Desa Banjarnendo tahun 2021-2024

Tabel tersebut menunjukkan jumlah penerima berbagai jenis bantuan sosial di Desa Banjarnendo selama periode tahun 2021–2024. Data memperlihatkan adanya dinamika jumlah penerima pada setiap program bansos, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang bersumber dari APBN maupun APBD, serta Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Perubahan jumlah penerima dipengaruhi oleh kebijakan

pemerintah pusat dan daerah, proses verifikasi dan pemutakhiran data penerima, serta penyesuaian kriteria kelayakan penerima bantuan. Penurunan atau peningkatan jumlah penerima tidak selalu menunjukkan berkurang atau bertambahnya tingkat kemiskinan secara langsung, tetapi juga berkaitan dengan pengalihan jenis bantuan, pembaruan data sosial ekonomi masyarakat, serta keterbatasan kuota bantuan yang diterima desa.

Pendekatan ketika mengkaji implementasi Bansos adalah teori George C. Edwards III, diawali kondisi abstrak dan pertanyaan terkait syarat implementasi Bansos berjalan lancar, dengan empat kebijakan publik yaitu Komunikasi (Communications), Sumber Daya (resources), sikap (dispositions atau attitudes) dan struktur birokrasi (bureaucratic structure) yang harus dilaksanakan beriringan.

Komunikasi Jika orang-orang yang bertanggung jawab terkait kebijakan memahami ukuran dan tujuan kebijakan, implementasi akan berjalan dengan baik. Dengan demikian, kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan harus dikomunikasikan dengan tepat kepada para pelaksana. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa ukuran dan tujuan kebijakan konsisten atau seragam. Komunikasi organisasi sangat kompleks dan rumit. Seseorang dapat menahannya hanya untuk tujuan tertentu, atau mereka dapat menyebarkanluaskannya. Selain itu, interpretasi yang berbeda akan dihasilkan dari berbagai sumber data. Orang yang bertanggung jawab untuk melaksanakan keputusan harus tahu bagaimana agar implementasi berjalan baik. Semua karyawan harus paham apa dan tujuan dari pelaksanannya. Para pembuat kebijakan tidak tahu yang dilakukan jika mereka melihat ketidakjelasan dalam spesifikasi kebijakan.

Sumber daya manusia Dalam teori implementasi kebijakan George C. Edward III, sumber daya merupakan faktor penting yang menentukan keberhasilan suatu kebijakan. Sumber daya tidak hanya mencakup jumlah personel, tetapi juga kualitas kemampuan pelaksana, ketersediaan informasi, kewenangan, serta fasilitas pendukung dalam pelaksanaan program. Tanpa sumber daya yang memadai, kebijakan yang telah dirancang dengan baik tidak akan dapat diimplementasikan secara optimal. Edward III menekankan bahwa keterbatasan sumber daya, baik secara kuantitas maupun kualitas, dapat menghambat efektivitas pelaksanaan kebijakan di lapangan. Sumber daya manusia menjadi aspek utama dalam implementasi karena pelaksana kebijakan harus memiliki pemahaman yang cukup terkait prosedur, teknis penyaluran, serta mekanisme pendataan penerima bantuan. Selain itu, sumber daya finansial juga berpengaruh, terutama dalam program bantuan sosial yang sangat bergantung pada alokasi anggaran dari pemerintah pusat maupun daerah. Ketersediaan sarana pendukung seperti data yang akurat, sistem administrasi, serta koordinasi antar pelaksana juga termasuk bagian dari sumber daya yang menentukan kelancaran program.

Disposisi merujuk pada sikap, komitmen, dan kemauan para pelaksana kebijakan dalam menjalankan program. Disposisi menjadi faktor penting karena keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh aturan dan sumber daya, tetapi juga oleh kesediaan pelaksana untuk mendukung dan melaksanakan kebijakan tersebut dengan sungguh-sungguh. Jika pelaksana memiliki sikap yang positif, memahami tujuan kebijakan, dan menunjukkan komitmen yang tinggi, maka proses implementasi akan berjalan lebih efektif. Sebaliknya, apabila pelaksana tidak mendukung kebijakan atau menjalankannya secara setengah hati, maka kebijakan sulit mencapai hasil yang diharapkan. Disposisi juga berkaitan dengan tingkat penerimaan pelaksana terhadap kebijakan, kejujuran dalam pelaksanaan tugas, serta konsistensi dalam menjalankan prosedur. Dalam konteks bantuan sosial, sikap aparatur desa sangat menentukan karena mereka berhadapan langsung dengan masyarakat dalam proses pendataan, verifikasi, dan penyaluran bantuan. Komitmen pelaksana untuk bersikap adil, transparan, dan bertanggung jawab menjadi kunci agar bantuan dapat disalurkan sesuai dengan tujuan program.

Struktur birokrasi merupakan faktor penting yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Struktur birokrasi berkaitan dengan pola organisasi, pembagian tugas, prosedur kerja, serta mekanisme koordinasi antar lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan program. Edward III menekankan bahwa struktur birokrasi yang jelas akan membantu pelaksana memahami peran dan tanggung jawab masing-masing, sehingga proses implementasi dapat berjalan secara tertib dan terarah. Sebaliknya, struktur yang rumit dan prosedur yang berbelit dapat menghambat efektivitas pelaksanaan kebijakan. Struktur birokrasi juga mencakup adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang menjadi pedoman dalam menjalankan program. SOP berfungsi untuk memastikan bahwa setiap tahapan pelaksanaan, mulai dari pendataan, verifikasi, hingga penyaluran bantuan, dilakukan secara sistematis dan sesuai aturan. Selain itu, koordinasi antar lembaga atau pihak yang terlibat sangat diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih tugas serta untuk memastikan bantuan disalurkan tepat waktu dan tepat sasaran.

Terkait dengan penelitian melaksanakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) oleh Dinas Soal untuk mengatasi kemiskinan di Desa Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu. Proses analisis data melibatkan tiga langkah utama:

pengurangan data, presentasi data, dan kesimpulan. Pengurangan data secara berkelanjutan selama penelitian. Ini melibatkan penyederhanaan dan meringkas laporan lapangan untuk mengidentifikasi aspek dan pola penting. Teknik pengumpulan data termasuk wawancara, pengamatan, dan dokumentasi. Memastikan validitas data merupakan aspek penting dari penelitian. Tujuannya guna menangkap data yang disediakan oleh subjek dan mencocokkannya dengan informasi mereka. Analisis data kualitatif menggunakan model Miles dan Huberman. Kegiatan analisis berkelanjutan dan interaktif sampai selesai, melibatkan tiga analisis. Temuan penelitian menyoroti efektivitas program BPNT dalam pengentasan kemiskinan di Desa Sisir, menunjukkan dampak positif dari inisiatif bantuan pangan non tunai [6]. Permasalahan Akses pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi terbatas di Desa Banjarebendo, menyebabkan tingkat kemiskinan yang tinggi. Sumber daya yang tidak mencukupi di desa, seperti yang disorot oleh kepala desa, berdampak pada efektivitas program bantuan sosial seperti BLT-DD. Kurangnya kejelasan dalam spesifikasi kebijakan, mengakibatkan tantangan untuk pelaksanaan dan pemantauan program karena sumber daya manusia yang tidak memadai tujuan utama penelitian ini. Mengurangi tingkat kemiskinan di Desa Banjarebendo melalui pelaksanaan program Bansos yang efektif. Meningkatkan kualitas hidup orang miskin dengan akses ke pendidikan, perawatan kesehatan, dan peluang ekonomi. Meningkatkan alokasi dan pengelolaan sumber daya untuk memastikan keberhasilan inisiatif bantuan sosial dalam memerangi kemiskinan.

## II. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif guna mengkaji fenomena sosial dengan analisis mendalam terhadap data non-numerik, seperti teks, wawancara, observasi, dan dokumen. Fokus utama dari penelitian kualitatif adalah pada makna, pengalaman, dan pandangan subjek penelitian, serta konteks di mana fenomena tersebut terjadi. Penelitian kualitatif berbasis deskriptif. Penelitian deskriptif guna memberi informasi objektif terkait keadaan pada objek yang diteliti [7]. Sedangkan pendekatan kualitatif untuk memahami secara menyeluruh fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, dan untuk mendeskripsikannya dengan kata-kata dan bahasa, dalam lingkungan alami dan dengan menggunakan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2005: 6). Informan Kunci penelitian yaitu Kepala Desa Banjarebendo, Kesra Pelaksanaan Bansos Desa Banjarebendo, Pegawai Bansos dan juga warga Desa Banjarebendo. Lokasi ini dipilih karena bisa dijadikan salah satu desa yang mengupayakan mengurangi kemiskinan dengan adanya Bansos di desa Banjarebendo. Teknik Pengumpulan data penelitian ini terdapat 2: teknik wawancara (Interview) adalah diskusi antara dua individu atau lebih (pewawancara dan informan); observasi secara umum adalah tindakan mengamati suatu hal tertentu di lokasi penelitian. Lebih lanjut, observasi ini mencakup proses mendokumentasikan secara metodis setiap gejala subjek yang diteliti. Dokumentasi mencakup pengumpulan, pemilihan, analisis, dan pengarsipan data dalam suatu bidang keahlian. Penyediaan atau pengumpulan bukti dan data, termasuk gambar, kutipan, klip koran, dan bahan referensi lainnya, merupakan definisi lain dari dokumentasi. Dokumentasi juga dapat didefinisikan sebagai jika peneliti menggunakan metode tidak langsung untuk mendapatkan data. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari jurnal dan publikasi media massa. Menurut Sugiyono (2010: 335), teknik analisis data merujuk pada proses pencarian dan penyusunan data yang dikumpulkan melalui dokumentasi, catatan lapangan, dan wawancara.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian ini menggunakan teori implementasi menurut Edward III, mengemukakan bahwa ada empat indikator yaitu, komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

### A. Komunikasi

Menurut Rogers dan D. Lawrence Kincaid (1981), komunikasi merupakan proses pertukaran informasi yang menghasilkan pemahaman bersama secara mendalam antar pihak. Dalam konteks implementasi kebijakan, komunikasi menjadi faktor penting karena berkaitan dengan penyampaian informasi, kejelasan pesan, serta konsistensi informasi kepada kelompok sasaran program. Terkait implementasi Bantuan Sosial dalam upaya pengurangan kemiskinan di Desa Banjarebendo, pemerintah desa secara aktif menyampaikan informasi kepada masyarakat setiap kali terdapat program bantuan sosial. Informasi tersebut disampaikan melalui perangkat desa serta koordinasi dengan lingkungan masyarakat. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh

Kepala Desa Banjarebendo, Bapak Sugeng Bahagia, S.H.: *“Warga dan Pemdes selalu menjalin komunikasi dengan baik setiap ada bansos. Pemdes selalu menginformasikan tepat waktu dan warga pun dapat menerima dengan baik sehingga tidak ditemukan miskomunikasi dalam penyaluran bansos di Desa Banjarebendo. Pemdes selalu membuka komunikasi dengan warga tentang bansos yang akan disalurkan, maka dari itu desa ini berhasil mengurangi kemiskinan warganya.”* Selain dari pihak pemerintah desa, hasil wawancara dengan warga penerima bantuan juga menunjukkan bahwa masyarakat memperoleh informasi bansos melalui jalur komunikasi yang ada di desa. Salah satu warga penerima bantuan menyatakan: *“Kalau*

*ada bantuan biasanya kami diberi tahu dari RT atau diumumkan dari desa, jadi kami tahu kapan pengambilan dan apa saja syaratnya.”* Namun demikian, masih terdapat warga yang belum sepenuhnya memahami detail program bantuan sosial yang diterima. Hal ini diungkapkan oleh warga lain: *“Kami tahu dapat bantuan, tapi kadang kurang paham bedanya bantuan dari pusat atau dari desa, yang penting kami diberi tahu waktu pengambilannya.”*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa komunikasi dalam implementasi bansos di Desa Banjarbendo telah berjalan cukup baik dalam hal penyampaian informasi dasar. Akan tetapi, masih diperlukan peningkatan kejelasan informasi terkait jenis dan mekanisme bantuan agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih menyeluruh. Temuan ini sejalan dengan penelitian Inka Nusamuda Pratama (2023) yang menunjukkan bahwa transparansi dan komunikasi yang efektif dari pemerintah kepada masyarakat menjadi salah satu faktor utama keberhasilan penyaluran bantuan sosial.[8]



Gambar 1. Kegiatan sosialisasi pengambilan Bansos  
Sumber : Hasil obsevasi lapangan di Desa Banjarbendo

## B. Sumberdaya

Paul A. Samuelson dan William D. Nordhaus (1948, edisi terbaru 2010); Dalam buku "*Economics*," Samuelson dan Nordhaus mendefinisikan sumber daya sebagai segala sesuatu guna memproduksi barang dan jasa, mengklasifikasikannya ke dalam empat kategori: sumber daya alam, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Pernyataan mengenai Impelmentasi Bantuan Sosial Upaya Mengurangi Kemiskinan di Desa Banjarbendo mengenai sumberdaya nya yang saat ini masi kurang mencukupi. Sebagaimana disampaikan oleh

Bapak Kepala Desa Sugeng Bahagia SH. *“Dari penjelasan Bapak Kepala Desa bahwasanya sumberdaya nya saat ini masi kurang mencukupi, ini bisa di lihat dari bantuan BLT-DD yaitu Bantuan Dana Desa, BLT-DD berupa uang BLT-DD ini bantuan yang di slurkan untuk warga yang terkena bencana alam seperti putting beling , covid-19 dan ruma yang tidak layank ditempati ,yang semakin berkurangnya mendapat bantuan ini, yang sudah tidak mendapat BLT-DD di alihkan ke bantuan pangan yaitu mendapat beras BULOG, dan yang mendapat bantuan BLT-DD bisa dipastika tidiak dapat bantuan apapun seperti PKH, APBD, APBN dan BULOG, dari situlah Desa Banjarbendo masi kurang cukup sumberdayanya karan pengurangan nya yang mendapat BLT-DD tetapi yang menentukan pun tetap adari pusat Desa hanya mengelola untuk menyalurkan bantuan tersebut, pembagian BLT-DD tersistem 3 bulan sekali dan 1 bulan nya dengan nominal Rp. 300.000 jadi saat menerima bantuan total yang di trima senilai Rp. 900.000“*

Analissai hasil wawancara menunjukan bahwa sumberdayanya masi 60% yang mewadahi maka dari itu yang warga yang mendapat bnantuan berkurang karna sumberdaya nya yang kurang mencukupi tetapi masi bisa di Atasi dengan Solusi memeberi bantuan lain sepeerti pernyataan di atas di kaitkan dengan penelitian Agung Aldino Putra (2018) menggarisbawahi pentingnya sumber daya yang cukup untuk keberhasilan pelaksanaan program bantuan sosial seperti Kube, menekankan perlunya dana yang memadai untuk memastikan efektivitas program, Pelaksana, seperti Dinas Sosus Palu, menghadapi kesulitan karena anggaran terbatas yang dialokasikan untuk program tersebut, berdampak pada keberhasilan pelaksanaannya [9].



Gambar 2. Penerimaan bantuan sosial berupa pangan dan non pangan  
Sumber : Hasil observasi lapangan di Desa Banjarbendo

### C. Disposisi

Gordon Allport (1937) Allport mengartikan disposisi sebagai kecenderungan atau sifat yang stabil yang dapat mempengaruhi perilaku individu. Ia percaya bahwa disposisi adalah bagian integral dari kepribadian seseorang. Pernyataan mengenai Implementasi Bantuan Sosial Upaya Mengurangi Kemiskinan di Desa Banjarbendo mengenai Disposisi/sifatnya sebagaimana yang disampaikan oleh

Bapak Khoirul Yahya S.Kom : “ Sikap dan Komitmen penyelenggaraan Bansos di Desa Banjarbendo ini sangat bagus Dimana pemdes sangat mendukung adanya Bansos ini agar warga kebutuhan pangan dan ekonomi nya tercukupi karna program Bansos yang disalurkan berupa bantuan tunai dan non tunai ( pangan ) sehingga Upaya mengurangi kemiskinan ini bisa berjalan dengan baik / sudah terealisasi, namun terdapat beberapa hambatan tentang pengajuan bantuan ke pusat, dimana saat pengajuan warga tidak dapat langsung di trima karna banyak nya mengajukan kepusat, salah satu kriteria yang bisa di acc dengan cepat yaitu datanya yang akurat atau lengkap”

Analisis Bantuan Sosial menunjukkan bahwa disposisi ini menjelaskan bahwa sikap dan komitmen warga dan pemdes ini sudah bagus karna di sini warga yang mendapat bantuan tunai dan non tunai dan pemdes yang membantu agar warga yang kurang mampu bisa mendapatkan bantuan tersebut meskipun adanya beberapa kendala namun bantuan tetap bisa tersalurkan dengan baik dengan baik. Di kaitkan dengan penelitian Asep Suryahadi (2012) sama seperti hasil penelitian saya bahwa peran pemerintah itu penting karna membantu jalan nya penyelesaian bantuan sosial sama dengan menunjukkan bahwa keterlibatan pemerintah desa sangat penting dalam pelaksanaan program bantuan sosial [10]. Dukungan dari pemdes Banjarbendo yang disebutkan dalam wawancara menunjukkan bahwa pemerintah desa memainkan peran aktif dalam memastikan distribusi bantuan yang adil dan tepat sasaran. Dan mengenai Hambatan dalam proses pengajuan bantuan ke pemerintah pusat juga telah dibahas dalam penelitian Studi oleh Nindy arum prajulitya (2022) menemukan bahwa salah satu kendala utama adalah banyaknya jumlah pengajuan yang diterima oleh pusat, sehingga memperlambat proses verifikasi dan persetujuan. Penelitian ini juga menekankan pentingnya data akurat sebagai kriteria utama untuk mempercepat proses persetujuan bantuan[11].

### D. Struktur Birokrasi

Max Weber (1922). Weber adalah salah satu pemikir pertama yang merumuskan konsep birokrasi. Menurut Weber, birokrasi sebagai organisasi yang dirancang secara rasional untuk mencapai efisiensi. Ia menekankan pentingnya hierarki, aturan, pembagian kerja, dan kepatuhan terhadap aturan sama hal nya tentang efisien atau tidak nya Program BANSOS ini seperti yang di sampaikan

Bapak Khoirul Yahya S.Kom “ memastikan bahwa bantuan disalurkan secara tepat waktu dan tepat sasaran serta koordinasi yang efektif antara berbagai lembaga atau departemen adalah aspek kunci untuk keberhasilan pelaksanaan program. Setiap tahap dalam proses penyaluran bantuan harus didokumentasikan dengan jelas dalam bentuk SOP. Ini termasuk kriteria penerima bantuan, proses pengajuan, verifikasi data, dan distribusi bantuan. Kriteria yang jelas dan transparan untuk menentukan penerima bantuan perlu ditetapkan untuk menghindari bias dan memastikan bantuan tepat sasaran.

Analisis hasil wawancara bahwasanya bantuan ini sudah tersalurkan dengan tepat waktu yang menjelaskan koordinasi nya yang memadai sehingga bantuan ini dapat tersalur dengan tepat dan berjalan sesuai prosedur atau bisa di bilang sudah efisien. Di kaitkan dengan penelitian oleh Marcellino Quartus Fresan Pontoh (2017) dalam penelitiannya tentang koordinasi antar lembaga pemerintah menekankan bahwa koordinasi yang efektif adalah kunci untuk keberhasilan program-program kompleks yang melibatkan berbagai Lembaga menemukan bahwa komunikasi yang baik, rapat koordinasi berkala, dan sistem informasi yang terpadu sangat penting untuk mengatasi hambatan

birokrasi dan memastikan semua pihak bekerja menuju tujuan yang sama. Ini sesuai dengan wawancara yang menyebutkan pentingnya koordinasi antar lembaga dalam penyaluran bantuan [12].

**Tabel 2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyaluran Bantuan Sosial Desa Banjarbendo**

| No | Tahap Kegiatan               | Uraian Kegiatan                                                           | Plaksanaan                         | Output                                  |
|----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1. | Pendataan calon penerima     | Pendataan warga kurang mampu berdasarkan DTKS dan hasil musyawarah desa   | Perangkat Desa, RT/RW              | Daftar sementara calon penerima         |
| 2. | Vetivikasi dan Validasi data | Pemeriksaan kelayakan data calon penerima sesuai kriteria program bansos  | Pemerintah Desa, Pendamping Sosial | Daftar penerima yang telah diverifikasi |
| 3. | Penetapan penerima           | Penetapan nama penerima bantuan sesuai hasil verifikasi                   | Kepala Desa                        | SK/Daftar resmi penerima bansos         |
| 4. | Kordinasi penyaluran         | Koordinasi dengan pihak penyalur (bank, kantor pos, atau lembaga terkait) | Pemerintah Desa, Lembaga Penyalur  | Jadwal dan mekanisme penyaluran         |
| 5. | Penyaluran bantuan           | Distribusi bantuan tunai/non-tunai kepada penerima                        | Lembaga Penyalur, Pemerintah Desa  | Bantuan diterima masyarakat             |
| 6. | Dokumentasi dan pelaporan    | Pencatatan, dokumentasi, dan pelaporan hasil penyaluran                   | Pemerintah Desa                    | Laporan realisasi penyaluran            |

*Sumber : Hasil observasi lapangan desa banjarbendo*

#### IV. KESIMPULAN

Pelaksanaan program Bantuan Sosial (BANSOS) di Desa Banjarbendo telah membawa dampak positif dalam upaya pengurangan kemiskinan, meskipun masih menghadapi berbagai kendala. Melalui teori implementasi George C. Edwards III, empat faktor utama—komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi—memiliki peranan yang saling berkaitan dalam menentukan keberhasilan program ini. Komunikasi yang efektif menjadi pondasi keberhasilan implementasi BANSOS. Pemerintah desa telah berupaya memberikan informasi yang jelas, tepat waktu, dan transparan kepada masyarakat terkait program bantuan. Hal ini membantu mencegah kesalahpahaman, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan membangun kepercayaan terhadap program. Namun, masih terdapat celah dalam penyampaian informasi yang menyebabkan sebagian warga kurang memahami detail bantuan, sehingga perlu peningkatan saluran komunikasi yang lebih mudah diakses dan inklusif. Sumber Daya Keterbatasan sumber daya, baik dana maupun tenaga pelaksana, menjadi tantangan utama. Dana yang tersedia untuk program BANSOS tidak selalu mencukupi kebutuhan semua penerima manfaat, sehingga beberapa warga tidak mendapatkan bantuan secara merata. Selain itu, jumlah dan kemampuan tenaga pelaksana juga terbatas, menghambat efektivitas pengawasan dan distribusi bantuan. Untuk mengatasi ini, diperlukan alokasi dana yang lebih besar, peningkatan keterampilan pelaksana, dan pengelolaan sumber daya yang lebih efisien. Disposisi (Sikap), Sikap dan komitmen pemerintah desa terhadap program BANSOS sangat positif. Mereka secara aktif mendukung pelaksanaan bantuan dengan tujuan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin dan rentan. Namun, pada tingkat yang lebih tinggi, proses administrasi seperti pengajuan bantuan ke pusat sering kali memakan waktu yang lama. Keterlambatan ini menunjukkan perlunya sistem pengajuan yang lebih cepat, didukung oleh data yang akurat dan lengkap, untuk mempercepat respons terhadap kebutuhan masyarakat. Struktur birokrasi yang terorganisasi dengan baik memainkan peran penting dalam keberhasilan program. Desa Banjarbendo telah menerapkan prosedur standar operasional (SOP) yang jelas untuk memastikan distribusi bantuan tepat sasaran dan sesuai jadwal. Koordinasi antar lembaga pemerintah, baik di tingkat desa maupun pusat, juga menunjukkan perbaikan yang signifikan. Namun, masih ada ruang untuk menyederhanakan proses birokrasi, terutama dalam hal verifikasi data dan pengambilan keputusan, agar distribusi bantuan menjadi lebih efisien dan akuntabel.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Kepada Yth. Mitra Desa Banjarbendo,

Saya, Mahasiswa magang, ingin menyampaikan rasa terima atas kesempatan dan dukungan selama masa magang kami di Desa Banjarbendo. Pengalaman yang kami dapatkan sangat berharga dan memberikan banyak pelajaran berharga dalam memahami dinamika serta tantangan yang dihadapi oleh desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Kerjasama dan bimbingan yang diberikan oleh seluruh mitra desa sangat membantu kami dalam mengembangkan pengetahuan dan keterampilan kami. Kami sangat menghargai segala bentuk bantuan, mulai dari informasi, panduan, hingga pengalaman langsung di lapangan. Semua ini tidak hanya menambah wawasan kami, tidak hanya itu, tetapi juga menginspirasi kami untuk terus membantu dalam memerangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Mudah-mudahan kolaborasi yang telah dibangun dengan baik ini dapat terus berlanjut dan memberikan manfaat lebih besar bagi Desa Banjarbendo.

Hormat Saya,  
[Nafilah Dzakiyah Al Azizah]

## REFERENSI

- [1] Intan Nur Lailiyah, intannurlailiyah28@gmail.com, (0) Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia
- [2] Luluk Fauziah dan, Isna Fitria Agustina. Analisis Kebijakan dalam Penanggulangan Kemiskinan melalui Pemberdayaan Berbasis *Participatory Rural Apraisal* (PRA) di Kabupaten Sidoarjo
- [4] Peraturan gubernur daerah khusus ibukota jakarta nomor 27 tahun 2023
- [5] Peraturan bupati sidoarjo nomor 54 tahun 2019
- [6] Dionita Putri Anwar, dionitaputri@gmail.com, Universitas Islam Malang
- [7] Yurensi, 2022. *Metode Penelitian Kualitatif*
- [8] Inka Nusamuda Pratama, inka.nusamuda@ummat.ac.id, Universitas Muhammadiyah Mataram
- [9] Agung Aldino Putra, [agung.aldiino@gmail.com](mailto:agung.aldiino@gmail.com), Program Studi Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Tadulak
- [11] Asep Suryahadi, Gracia m Hadiwidjaja, Sudarno Sumarto, *Economic Growth and Poverty Reduction in Indonesia Before and After the Asian Financial Crisis*, The SMERU Research Institute Jakarta, 2012
- [10] Nindy arum prajulya, Analisis Implementasi Desa Prima di Desa Mandiri Budaya SabdodadiKapanewon Bantul Kabupaten Bantul, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta, 2022
- [12] Marcellino Quartus Fresan Pontoh, Muh. Ridha Suaib, Kamaluddin Kamaluddin, Analisis Pelaksanaan Kordinasi Dalam Pencapaian Program Likup Sekretariat Pemerinath Kabupaten Sorong, Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Muhammadiyah Sorong, 2017

### **Conflict of Interest Statement:**

*The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.*